



**KEBIJAKAN KEAMANAN PERANCIS TERHADAP TERORISME TRANSNASIONAL
PASCA SERANGAN PARIS NOVEMBER 2015**

Roy Setiawan

Universitas Paramadina

Email: roysayesya14@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Diterima : 26-01-2022

Direvisi : 06-02-2022

Disetujui : 21-02-2022

Kata Kunci: kebijakan keamanan; serangan Paris terorisme;

Abstrak

Tanggal 13 November 2015 Perancis mengalami serangan luar biasa yang membuat trauma yang mendalam bagi masyarakat Perancis. Serangan teror Paris ini diklaim oleh ISIS, adapun rangkaian serangan terorisme terdiri dari: 1) aksi bom bunuh diri di tempat-tempat keramaian seperti kafe, bioskop, serta stadium, seperti di Bataclan Concert Hall; 2) Penyanderaan 1.000 orang sebelum kemudian menembaki mereka, dengan korban 89 terbunuh di tempat (Higgins, International New York Times, 16 November 2015). Dengan hal tersebut sebagai Negara Perancis akan memberikan respon dan juga kebijakan terkait dengan masalah keamanan serta terorisme transnasional agar tidak terjadi hal serupa dikemudian hari. Tujuan dalam penelitian ini ingin melihat sejauh mana respon yang diberikan oleh Perancis dan juga bentuk kebijakan jangka pendek sebagai aktor utama dalam melindungi warga negaranya terhadap serangan terorisme (ISIS), karena Perancis merupakan negara yang memiliki pertahanan yang sangat baik terhadap ancaman-ancaman yang datang dari luar negaranya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan respon Negara Perancis dengan merubah status Negara menjadi keadaan darurat dan juga menutup semua perbatasan akses masuk ke negara Perancis. Selain itu banyaknya desakan sebagai Kepala Negara Hollande untuk segera membuat undang-undang baru mengenai terorisme. Kerjasama juga dilakukan oleh Perancis terhadap beberapa negara di sekitarnya seperti Belgia, Inggris, Uni Eropa bahkan juga dengan Amerika Serikat guna untuk menangkap pelaku penyerangan dan juga untuk membuat pertahanan yang lebih baik lagi untuk kedepannya agar serangan Terorisme tidak akan terjadi kembali.

Keywords: *security policy; terrorism; Paris Attack*

Abstract
On November 13, 2015 France experienced an extraordinary attack that deeply traumatized French society. The Paris terror attack was claimed by ISIS, while the series of terrorist attacks consisted of: 1) suicide bombings in crowded places such as cafes, cinemas, and stadiums, such as the Bataclan Concert Hall; 2) Taking 1,000 people hostage before opening fire on them, with 89 killed on the spot (Higgins, International New York Times, November 16, 2015). With this, as a French state, it will provide a response and also policies related to security issues and transnational terrorism so that similar things do not happen in the future. The purpose of this study is to see the extent of the response given by France and also the form of short-term policies as the main actor in protecting its citizens against terrorist attacks (ISIS), because France is a country that has a very good defense against threats that come from outside his country. In this study the author uses the methodology used as a qualitative method. The results showed the response of the French State by changing the state's status to a state of emergency and also closing all access borders to the French state. In addition, there are many pressures as Head of State Hollande to immediately make a new law on terrorism. Cooperation is also carried out by France against several surrounding countries such as Belgium, Britain, the European Union and even the United States in order to catch the perpetrators of the attack and also to make better defenses for the future so that terrorism attacks will not happen again.

Corresponden author: Roy Setiawan

Email: roysayesya14@gmail.com
artikel dengan akses terbuka di bawah

lisensi

CC BY SA



Pendahuluan

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara (Wajidi, 2017). Terorisme pada saat sekarang bukan saja merupakan sesuatu kejahatan lokal atau nasional, tetapi sudah merupakan suatu kejahatan transnasional bahkan internasional. Terorisme yang sudah menjadi suatu kejahatan yang bersifat internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa (Sonjaya, 2017).

Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan (Winarni, 2016). Isu terorisme sudah muncul semenjak berakhirnya perang dunia II, namun semenjak terjadinya aksi

terorisme di World Trade Center (WTC) atau sering kita kenal dengan kasus serangan 11 september atau 9/11, isu terorisme di mata dunia internasional menjadi masalah yang serius. Terorisme berkembang dengan menebarkan ketakutan untuk memunculkan spekulasi baru terhadap ancaman yang datang.

Serangan 11 september 2001 yang menghancurkan gedung WTC dan mengakibatkan kerusakan dan banyak korban memicu reaksi keras dari Amerika Serikat. Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Presiden George W. Bush menyatakan perang terhadap kelompok teroris Al-Qaeda dan akan memburu pemimpin dari kelompok itu yang bertanggung jawab atas korban pemboman gedung World Trade Centre tersebut ([Nizmi & Milia, 2015](#)). Pasca serangan teror di WTC, Amerika melihat aksi terorisme merupakan kejadian luar biasa yang memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap perubahan dalam kepentingan nasional Amerika Serikat yang terefleksikan di dalam kebijakan luar negerinya khususnya bidang keamanan ([Triwahyuni, 2013](#)).

Perkembangan jaringan terorisme terus berkembang setiap saat bahkan semakin terstruktur. Menurut buku “studi strategi dan keamanan” oleh Jerry Indrawan, kemajuan teknologi informasi memberikan dampak positif bagi tumbuh pesatnya jaringan terorisme ([Indrawan, 2016](#)). Kekuatan globalisasi sekarang khususnya pada kemajuan teknologi informasi, membuat hal tersebut dimanfaatkan oleh para teroris untuk menyebarkan kekerasan serta kebencian secara global. Semakin banyaknya informasi yang tersebar melalui internet Teroris dalam aksinya menggunakan teknologi berbasis jaringan, termasuk bagaimana menggunakan internet sebagai media propaganda ([Putra & Priyanto, 2021](#)). Dengan hal tersebut telah memberikan peluang bagi jaringan terorisme dalam berkembang, informasi yang bersifat tutorial (mengajarkan) dalam membentuk amunisi atau senjata seperti bom ataupun senjata nuklir sudah tersedia dalam jaringan internet. Ini memberikan akses kemudahan bagi para teroris dalam memperkuat pertahanan dalam urusan persenjataan. Dengan semakin majunya teknologi informasi mempermudah akses komunikasi para teroris ini dalam mengkoordinasikan apapun melalui internet, telpon dsb. Koordinasi yang baik sangat dibutuhkan bagi jaringan terorisme ini dalam melakukan aksi-aksi teror. Internet merupakan alat komunikasi yang mudah di akses dan sudah tak terelakkan lagi eksistensinya di jaman sekarang ini, hal inilah yang memberikan kemudahan bagi para teroris untuk berkomunikasi dalam setiap aksinya. Internet pun dapat menjadi media propaganda untuk menyebarkan paham serta pengaruh terorisme terhadap khalayak luas.

Kajian tentang Serangan Paris November 2015 sebelumnya sudah pernah dibahas oleh Bpk Partogi Nainggolan dalam jurnalnya yang berjudul ”Serangan Terorisme Internasional di Paris”. Dalam tulisannya melihat fakta-fakta yang terjadi dalam serangan serta kronologis serangan terorisme internasional yang terjadi. Selain itu dalam tulisannya penulis melihat sikap Indonesia yang terus mendukung aksi-aksi melawan terorisme, serangan terorisme internasional yang terjadi di Paris diklaim didalangi oleh kelompok radikal ISIS ([Nainggolan, 2016](#)). Selain itu penelitian mengenai pasca serangan paris pernah diteliti oleh Center For American Progress by Vikram Singh, Ken Gude, Peter Juul, William F. Wechsler, Hardin Lang, and Brian Katulis, dalam penelitiannya menekankan bagaimana respon Amerika terhadap terorisme internasional ISIS serta strategi AS untuk menghadapi ISIS. Memperbarui strategi AS anti-ISIS dimulai sejak serangan Paris harus fokus pada tujuan berikut ([Singh et al., 2015](#)):

1. Meningkatkan operasi untuk menurunkan gerakan ISIS dan kelompok teroris lainnya dan memastikan bahwa mereka tidak dapat mempertahankan perlindungan untuk merencanakan serangan berikutnya.
2. Memanfaatkan aksi militer yang semakin meningkat untuk memajukan solusi politik dalam perang sipil Suriah yang dapat mulai memberikan stabilitas, membuka jalan bagi rakyat Suriah untuk memiliki transisi di luar pemerintahan brutal Presiden Bashar al-Assad, dan memungkinkan masyarakat internasional untuk fokus pada ISIS
3. Mendukung pemerintah upaya Irak dan Irak Kurdi 'untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai ISIS
4. Membatasi ketidakstabilan menyebar ke tetangga seperti Yordania, Lebanon, dan Turki dan melemahnya ISIS pijakan lebih jauh di tempat-tempat seperti Libya dan Afghanistan

Dengan referensi kedua penelitian diatas, untuk penelitian ini akan difokuskan dalam melihat bagaimana respon dan langkah cepat yang dilakukan oleh Perancis dalam membuat kebijakan keamanan guna melindungi warga negaranya dari ancaman kejahatan transnasional yaitu terorisme, serta langkah selanjutnya dengan menjalin kerjasama dengan negara lain, Pentingnya dalam penelitian ini, guna melihat bagaimana negara superior seperti Perancis merespon dengan cepat dan membuat kebijakan keamanan dalam kondisi yang darurat, hal tersebut bisa menjadi contoh bagi negara lain apabila dikemudian hari mendapatkan ancaman yang sama. Dengan fakta bahwa negara dengan perlengkapan senjata yang sangat lengkap dan tingkat keamanan yang super tinggi saja masih bisa ancaman kejahatan terorisme masuk ke dalam negaranya.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, penulis membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami ([Habsy, 2017](#)). Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Dalam penelitian ini ingin mendeskripsikan bagaimana kebijakan Perancis dalam merespon sebuah ancaman dalam negaranya yakni dari ancaman Terorisme. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Serangan Paris November 2015

Tanggal 13 November 2015 akan menjadi hari yang tidak akan dilupakan bagi rakyat Perancis dimana ratusan orang menjadi korban tewas dan terluka akibat serangan teroris di

kota Paris yang merupakan ibu kota Perancis. Penembakan massal, penyanderaan hingga bom bunuh diri menjadi rangkaian serangan terorisme yang terjadi di beberapa titik mulai dari restoran, hotel sampai stadium bola. Serangan tersebut terjadi di hari menjelang libur sehingga banyak warga Paris yang menikmati malam di tempat-tempat keramaian. Dikutip dari ANTARA [News](#) serangan terjadi pada Jumat malam hingga dini hari waktu setempat (Sabtu WIB), berikut kronologi awal kejadian waktu Paris dari rangkuman laporan kantor berita Agence France-Press (AFP) dan Reuters ([Reuters](#), 2015).

Kejadian dimulai pukul 21:09 waktu setempat. Seorang pria tak dikenal dilaporkan melepas tembakan di sebuah restoran dan menyebabkan sejumlah orang tewas dan terluka. Pelaku menggunakan senapan jenis Kalashnikov (AK). Polisi Paris mulai memperketat penjagaan. Tiga puluh menit berselang adanya laporan yang melibatkan serangan yang ada, polisi melaporkan korban tewas gabungan dari sejumlah lokasi berjumlah 20 orang, tetapi belum diketahui apakah serangan masih berlangsung atau tidak. Ada dua bom bunuh diri meledak di luar stadion utama State de France, yang menjadi lokasi tim sepak bola Prancis itu bermain melawan tim Jerman. Sejumlah orang ditemukan tewas. Selain itu ada saksi mata mengatakan, pria bersenjata menangkap selusin orang di konser Bataclan. Aksi ini tercatat polisi Prancis sebagai serangan mematikan kedua. Gedung konser yang berdekatan dengan kantor Charlie Hebdo, yang telah diserang oleh kelompok militan pada 7 Januari 2015.

Dua jam setelah serangan pertama terjadi segera Presiden Prancis, François Gérard Georges Nicolas Hollande mengumumkan di televisi dan radio bahwa keadaan darurat dinyatakan untuk Prancis. "Prancis harus kuat melawan terorisme. Penyerang itu di Paris, yang sangat mengkhawatirkan. Kami mengambil semua personel keamanan, pertemuan Kabinet akan dilakukan, militer telah dikerahkan," katanya. Setelah serangkaian serangan yang terjadi beberapa jam, 153 korban dinyatakan meninggal. Lebih dari 100 kematian selama penembakan di Bataclan dan 40 lainnya di lokasi yang berbeda di seluruh Prancis. Tiga pelaku telah ditembak oleh polisi di tempat kejadian.

Dalam hal ini serangan Paris November 2015 merupakan masalah keamanan yang dihadapi oleh Prancis sebagai aktor dalam menciptakan perlindungan bagi masyarakat didalamnya. Jadi keamanan bagi suatu negara adalah hal yang penting, sebagai upaya perlindungan dari ancaman maupun negara lain. Ancaman-ancaman yang terjadi dalam penelitian ini yaitu terorisme internasional.

2. Pelaku dan Strategi Penyerangan

Tiga Bom terjadi dalam serang di Stadion, tiga penyerang meledakkan rompi bom bunuh diri di luar Stade de France, di mana pertandingan sepak bola antara Prancis dan Jerman sedang dimainkan. Gerbang D Bomber, penyerang pertama meledakkan dirinya di pukul 9:20 waktu setempat di Rue Rimet, serta di dekat Gerbang D stadion. Satu orang dikabarkan tewas dalam serangan bom tersebut.

Penyerang membawa paspor bernama Ahmad al-Mohammad dari Idlib, Suriah. Paspor tersebut telah digunakan oleh seorang pria yang menyamar sebagai migran yang melewati pulau Yunani Leros pada 3 Oktober 2015 dan Presevo, Serbia, pada 7 Oktober 2015. Pihak berwenang Prancis percaya bahwa paspor mungkin telah dicuri, dan polisi Prancis meminta masyarakat untuk membantu dalam mengidentifikasi orang itu, menggunakan foto dari dokumen identitas yang dikeluarkan di Yunani.

Gerbang H Bomber, penyerang kedua tak dikenal di stadion meledakkan dirinya pada pukul 9:30 waktu setempat di Rue Rimet, dekat Gerbang H stadion. Tidak ada orang yang dilaporkan tewas. Pada tanggal 22 November 2015. Kepolisian Nasional Perancis memposting gambar pelaku penyerangan tanpa identitas di Twitter, ini dimaksudkan apabila ada orang yang memiliki informasi tentang orang tersebut untuk menghubungi pihak berwenang.

Penyerangan yang dilakukan oleh Terorisme merupakan bentuk ancaman keamanan non tradisional dikarenakan objek penyerangan tersebut bukanlah hanya negara melainkan penduduk lokal atau individu. Terorisme “baru” tidak memiliki otoritas yang baku dalam bagaimana melakukan aksi-aksi terorisme yang berlangsung, mereka dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang mereka anggap dapat memberikan pencerahan dalam melakukan aksi-aksi teror ([Indrawan](#), 2016). Dengan hal tersebut para teroris sekarang dapat dengan bebas melakukan aksi terorisme tanpa terbatas dengan aturan maupun otoritas yang baku. Kelompok terorisme sekarang tidak terbatas lagi dengan wilayah-wilayah yang luas serta batas-batas negara dalam menarik sumber daya yang berpotensi untuk menjadi anggota baru dalam melakukan operasi teror di beberapa negara. Ini memungkinkan jaringan tersebar lebih luas, bahkan mereka dapat mengajarkan sumberdaya yang berpotensi tadi ilmu-ilmu merakit amunisi-amunisi seperti bom rakitan, latihan perang dll, dalam melaksanakan setiap aksi terorisme. Sehingga bisa dilihat pelaku penyerangan sifatnya tidak berkaitan secara koordinasi terstruktur antara satu dengan yang lain.

3. Respon Perancis

Serangan yang terjadi membuat masyarakat perancis menjadi ketakutan dan merasa tidak aman dengan kondisi yang ada, hal ini memberikan dampak yang cukup besar dari segi psikologis dan ekonomis terhadap masyarakat paris maupun korban-korban yang terkena serangan teror tersebut. Marah, benci, murka, takut menjadi bentuk ekspresi masyarakat paris terhadap terorisme yang melakukan serangan yang mengakibatkan banyaknya korban tewas dan luka-luka. Pemerintah Hollande merespons dengan amat reaktif rangkaian serangan terorisme di Paris seperti dibuktikan dengan pernyataannya yang akan menghancurkan ISIS/IS. Serangan ini baginya merupakan aksi perang terhadap Perancis, sehingga, ia memperpanjang kondisi darurat di Perancis, dengan merevisi konstitusi. Ia segera melancarkan operasi anti-teror di dalam negeri dan memerintahkan AU Perancis menggelar pemboman intensif atas basis-basis ISIS/IS di Suriah dari kapal induk Charles de Gaulle ([Muhaimin](#), 2015).

Dalam membuat suatu kebijakan, negara harus mampu melihat dari berbagai sudut pandang apalagi berkaitan dengan keamanan nasional yang mempengaruhi kemaslahatan masyarakat luas. Keamanan merupakan salah satu hal yang sifatnya penting dan dianggap sebagai masalah utama yang memengaruhi kedaulatan sebuah negara dalam kasus ini serangan paris merupakan kejadian luar biasa yang membuat perancis menjadi wilayah yang mencekam. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah secara langsung pasca serangan yang terjadi dengan menjadikan perancis berstatus siaga darurat.

4. Penangkapan Pelaku Penyerangan

Sesaat setelah terjadinya penyerangan Pemerintah Perancis gencar memburu pelaku penyerangan luar biasa yang melumpuhkan aktivitas di Paris hingga membuat efek traumatis

bagi masyarakat Paris. Dilansir dari New York Times Polisi Prancis menggerebek sebuah apartemen awal pada 18 November di Paris pinggiran utara St.-Denis, beberapa mil dari tempat serangan bom bunuh diri di Stade de France berlangsung, tiga orang tewas, termasuk Abdelhamid Abaaoud, seorang pria Belgia 28 tahun yang dicurigai merencanakan serangan Paris, dan sepupunya 26 tahun Hasna Aitboulahcen.

Seorang jaksa Prancis mengatakan Mr Abaaoud dan Chakib Akrouh, 25, yang meninggal selama serangan itu, diperkirakan telah berpartisipasi dalam serangkaian serangan di luar empat restoran. Para pejabat intelijen di Prancis dan Amerika Serikat sebelumnya mengatakan mereka percaya Mr Abaaoud berada di Suriah. Dia telah berjuang untuk negara Islam di Suriah dan telah mencolok ditampilkan dalam propaganda negara Islam.

Kebijakan dalam menangani masalah keamanan nasional yang diambil oleh perancis membutuhkan penyelesaian yang tidak hanya dilakukan oleh perancis itu sendiri, dalam membuat kebijakan keamanan nasional perancis juga melakukan kerjasama dengan beberapa negara dalam menangani serangan yang terjadi November 2015 ini. Kerjasama dengan Amerika Serikat dalam penguatan militer dalam menghadapi terorisme internasional pasca serangan paris November 2015 adalah salah satu langkah perancis dalam membuat kebijakan keamanan nasional.

5. Respon Uni Eropa dan Internasional

Serangan luar biasa yang terjadi di Paris memberikan efek luar biasa pula bagi dunia Internasional, hal ini memberikan reaksi negara-negara di seluruh dunia dalam melihat kejahatan terorisme internasional. Serangan tersebut menjadikan peringatan bagi negara-negara di dunia ini untuk lebih waspada dalam melindungi wilayah, masyarakat, dan juga kemaslahatan manusia dari terorisme internasional. Reaksi yang diberikan negara-negara terhadap serangan yang terjadi beragam dimulai dari ucapan turut berbelasungkawa atas serangan yang menimpa masyarakat Prancis hingga pembuatan kebijakan baru di beberapa negara terdekat Prancis guna mencegah terjadi serangan serupa di negara mereka. Sebenarnya respon yang diberikan oleh negara-negara terhadap apa yang dialami oleh Prancis merupakan sebuah bentuk bantuan moral terhadap Prancis dan juga bentuk solidaritas bersama dalam menghadapi masalah yang terjadi.

6. Uni Eropa

Uni Eropa merupakan wadah beberapa negara di wilayah eropa,tidak terlepas dari itu dari sektor Uni Eropa dalam melihat apa yang terjadi di Paris adalah salah satu pekerjaan rumah yang harus dilakukan Uni Eropa dalam mencegah terjadinya hal serupa di wilayah eropa. Diskusi di tingkat Uni Eropa sejauh ini sangat terfokus pada pengambilan keputusan yang berkelanjutan dalam hal penegasan kembali terhadap pengambilan langkah pada hubungan antara kontra terorisme dan sistem kontrol keamanan pada bagian perbatasan. Perbatasan merupakan hal yang krusial dimana banyak hal yang terjadi yang menjadi indikator dimana munculnya awal terorisme yang bermunculan. Ini yang menjadi fokus bagi komisi Eropa untuk langkah-langkah selanjutnya dalam proses penanganan serta penanggulangan aksi-aksi terorisme yang terjadi setelah adanya serangan Paris November 2015 ([Lindawaty](#), 2018).

7. Belgia

Peningkatan kewaspadaan mengemuka beberapa jam setelah seorang tersangka ditahan di Belgia dengan tuduhan terlibat dalam serangan di Paris, Prancis. Tersangka, yang

identitasnya dirahasiakan itu, ialah individu ketiga yang ditangkap di Belgia atas tuduhan terlibat serangan di Paris setelah Hamza Attou dan Mohammed Amri. Kedua orang itu disangka membantu Abdeslam Salah, salah seorang tersangka pelaku penyerangan yang kini masih buronan. Bahkan, Abdelhamid Abaaoud, 27, yang dicurigai menjadi aktor intelektual serangan, ialah warga kawasan Molenbeek, di Kota Brussels ([BBC News](#), 2015a).

Selain keamanan yang diperketat dan juga pencarian pelaku serangan beberapa hari setelah adanya serangan di Paris, pemerintah Belgia segera membuat RUU darurat dalam menangani masalah terorisme. Perdana Menteri Belgia, Manuel Valls, mengatakan, RUU itu akan digunakan sebagai payung hukum dalam menghadapi aksi terorisme, sehingga jika telah disahkan, RUU ini bahkan mengizinkan polisi untuk mengenakan tahanan rumah kepada siapa pun yang dianggap dapat menimbulkan “ancaman terhadap keamanan nasional”, sementara paspor atau kartu identitas nasionalnya disita.

8. Inggris

Respon juga diberikan oleh negara Inggris, seperti halnya Belgia yang memperketat keamanan negaranya, Inggris juga melakukan hal yang sama yaitu meningkatkan keamanan di dunia maya. Menteri Keuangan Inggris George Osborne, mengumumkan, anggaran pemerintah Inggris untuk upaya memberantas kejahatan siber akan bertambah dua kali lipat menjadi £1,9 miliar (sekitar Rp39 triliun) per tahun sampai 2020 ([BBC News](#), 2015b) Rencana itu dirilis setelah ISIS mengklaim berada di balik serangan di Paris yang membunuh 129 orang. Osborne mengatakan, ISIS telah membuktikan kemampuan mereka dalam memanfaatkan internet "untuk tujuan propaganda", termasuk radikalisme dan perencanaan operasi.

9. Amerika Serikat

Lebih dari 12 negara bagian Amerika Serikat mengatakan mereka tidak lagi menerima pengungsi Suriah karena kekhawatiran mengenai situasi keamanan setelah serangan Paris. Gubernur Michigan Rick Snyder mengungkapkan ia menanggukuhkan penerimaan pendatang baru hingga adanya ulasan lebih lanjut.

Alabama, Texas dan beberapa negara lainnya mengeluarkan pernyataan serupa tapi seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan legalitas tindakan ini masih belum jelas. Sebelumnya, Presiden Barack Obama mendesak AS untuk "meningkatkan dan turut berperan serta" dalam membantu orang-orang yang melarikan diri dari perang saudara. "Menolak mereka adalah pengkhianatan akan nilai-nilai yang kita anut," katanya. "Negara kami dapat menyambut pengungsi yang putus asa dalam mencari keselamatan dan menjamin keamanan kita sendiri. Kita bisa dan harus melakukan keduanya," jelas Obama ([France](#), 2015).

Bila dilihat dari beberapa respon yang diberikan oleh Uni Eropa, Belgia, Inggris dan Amerika Serikat bisa kita simpulkan semua berusaha memerangi kejahatan Terorisme dengan membuat kebijakan keamanan nasionalnya dengan mencoba meningkatkan persenjataan pertahanan, meningkatkan teknologi informasi guna melacak pergerakan terorisme di era baru ini. Semua negara sepakat Terorisme merupakan ancaman keamanan yang menjadi masalah serius. Selain itu masalah keamanan nasional suatu negara akan mempengaruhi juga kebijakan keamanan nasional negara lainnya, contoh seperti negara tetangga Perancis yaitu Belgia dengan membuat RUU terbaru tentang terorisme. Hal ini membuktikan bahwa

Terorisme bukan saja menjadi ancaman yang sifatnya nasional tapi sudah dalam lingkup Internasional.

10. Kebijakan Keamanan Perancis

Presiden Perancis Francois Hollande melakukan agenda setting terhadap keamanan negara demi meningkatkan rasa aman bagi warga negaranya. Teror yang mengerikan yang terjadi telah menimbulkan trauma dan kenangan buruk bagi warga Perancis dimana mayat-mayat berserakan di jalan-jalan ibukota Perancis, suara ledakan, tembakan serta ketakutan yang mendalam menambah panjang catatan kenangan buruk yang diterima oleh warga masyarakat Perancis, mereka seakan-akan merasa tidak aman dan terancam apabila melakukan aktivitas-aktivitas diluar rumah atau di lingkungan sekitar.

Dengan adanya serangan yang terjadi, Presiden Perancis menggelar press conference untuk menanggapi serangan teror tersebut. Dalam press conference nya, ia menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) kebijakan yang diambil, yaitu :

- a. Keadaan darurat akan dinyatakan, yang berarti beberapa tempat akan ditutup, lalu lintas dapat dilarang dan juga akan ada pencarian menyeluruh terhadap pelaku serangan teror dengan hal tersebut keadaan darurat akan diberitakan ke seluruh wilayah Perancis.
- b. Menutup perbatasan, dimana kepolisian Perancis akan menutup seluruh akses masuk menuju Perancis. Teror Paris tersebut memaksa Hollande untuk membuat Undang-undang baru mengenai terorisme.

Ancaman keamanan yang timbul memberikan dampak yang luar biasa bagi Perancis dalam menyikapi fenomena yang berlangsung. Perancis mengambil langkah sekuritisasi sebagai respon cepat terhadap ancaman keamanan yang ada, keamanan dianggap sebuah harga mati bagi sebuah negara dalam proses perlindungan diri dari ancaman-ancaman yang ada. Terorisme merupakan ancaman keamanan yang menjadi masalah serius bagi Perancis pasca serangan teror yang terjadi. Hal ini bisa dilihat dari kedua kebijakan diatas.

11. Kerjasama Perancis dan Amerika Serikat

Pasca Penyerangan yang terjadi di Paris, Prancis, Jumat 13 November lalu. Pemerintahan Perancis dan Amerika Serikat sepakat untuk lebih meningkatkan kerja sama militer untuk melawan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Kesepakatan ini diambil oleh kedua menteri pertahanan dari dua negara tersebut, yakni Menteri Pertahanan AS Ashton Carter dan Menteri Pertahanan Perancis Jean-Yves le Drian ([Internasional metro tv News](#), 2015). Dalam kesepakatan ini memunculkan langkah konkret untuk mengintensifkan kerja sama melawan tindakan radikal. "Mereka sepakat militer AS dan militer Prancis harus mengambil serangan yang berkelanjutan terhadap ISIS. Dan, mengintensifkan kerja sama yang erat," kata Sekretaris Pers Pentagon Peter Cook.

Menteri Pertahanan AS Ashton Carter pun telah menegaskan kembali komitmen Negeri Paman Sam untuk mendukung Prancis untuk menghancurkan ISIS. Sementara itu, Wakil penasehat keamanan nasional AS, Ben Rhodes, mengatakan Amerika Serikat dan Prancis juga akan mengintensifkan koordinasi intelijen antar keduanya.

12. Kerjasama Perancis dan Belgia

kedua negara tersebut melakukan kajian kerjasama intelijensi diantaranya, pentingnya memperkuat sebuah kesepakatan untuk melacak dan membagikan nama-nama penumpang pesawat sebagai bagian dari usaha-usaha untuk mencegah kejadian Paris terulang kembali, mengingat sejumlah pelaku insiden tersebut berkunjung dengan bebas di penjuru Eropa

sebelum kejadian berlangsung. Paris mendorong kesepakatan terkait pembagian nama-nama penumpang pesawat untuk membantu melacak para ekstrimis yang kembali. Kedua pemerintah juga mendukung rencana yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa untuk mengubah ketentuan Schengen demi mengembalikan kendali perbatasan eksternal secara wajib dan sistematis, termasuk terhadap mereka yang memiliki paspor Uni Eropa.

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Belgia dan Perancis meliputi peningkatan keamanan, kerjasama polisi Belgia dan Perancis dalam proses penangkapan pelaku serangan Paris dan kerjasama ekstradisi terhadap penyelesaian pelaku kasus serangan Paris.

Dengan dilakukannya kerjasama-kerjasama dengan beberapa negara yaitu Amerika Serikat dan Belgia, ini merupakan langkah selanjutnya yang diambil oleh Perancis untuk memperkuat keamanan dan kestabilan negaranya, hal ini selaras dengan tugas negara dalam memperkuat kebijakan keamanan nasionalnya untuk melindungi warga negaranya. Kerjasama tersebut juga bentuk dari langkah nyata negara Perancis dalam memerangi kejahatan Terorisme Internasional.

Kesimpulan

Serangan Paris November 2015 merupakan serangan luar biasa yang diterima oleh Perancis sebagai bentuk aksi terorisme yang meluluhlantakkan Paris dalam waktu beberapa jam saja. Tanggal 13 November 2015 akan menjadi hari yang tidak akan dilupakan bagi rakyat Perancis dimana ratusan orang menjadi korban tewas dan terluka akibat serangan teroris di kota Paris yang merupakan ibu kota Perancis. Penembakan massal, penyanderaan hingga bom bunuh diri menjadi rangkaian serangan terorisme yang terjadi di beberapa titik mulai dari restoran, hotel sampai stadium bola.

Setelah serangan tersebut pemerintah Perancis dengan tanggap merespon setiap kejadian yang terjadi, sesaat setelah serangan Presiden Perancis menggelar press conference untuk menanggapi serangan teror tersebut. Dalam press conference nya, ia menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) kebijakan yang diambil. Pertama, keadaan darurat akan dinyatakan, yang berarti beberapa tempat akan ditutup, lalu lintas dapat dilarang dan juga akan ada pencarian menyeluruh terhadap pelaku serangan teror dengan hal tersebut keadaan darurat akan diberitakan ke seluruh wilayah Perancis. Kedua, menutup perbatasan, dimana kepolisian Perancis akan menutup seluruh akses masuk menuju Perancis. Teror Paris tersebut memaksa Hollande untuk membuat Undang-undang baru mengenai terorisme.

Kebijakan tersebut diambil untuk menangani secara cepat masalah yang terjadi, lebih lanjutnya kebijakan yang diambil oleh Perancis dalam menjaga keamanan dan kestabilan negaranya adalah dengan melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dan Belgia. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut terkait dengan serangan teror yang terjadi. Jadi, kebijakan keamanan yang dilakukan oleh Perancis meliputi kerjasama dengan Amerika Serikat dan Belgia, dalam upaya untuk menangani serta mencegah terjadinya kembali serangan yang sama di kemudian hari. Kerjasama tersebut meliputi penguatan kerjasama militer, kerjasama penguatan intelijensi, kerjasama penguatan keamanan di perbatasan serta kerjasama lain yang berhubungan langsung dengan masalah terorisme transnasional.

Terorisme merupakan kejahatan yang serius dan menjadi musuh bersama, dengan apa yang terjadi pada kejadian di Paris, membuat kita sadar ancaman akan datang kapan saja bahkan

tidak pandang tempat dimanapun. Perancis merupakan negara yang cukup kuat dalam hal pertahanan namun serangan yang terjadi menunjukkan bahwa semua negara harus mampu melindungi warga negaranya dari ancaman kejahatan terorisme. Respond dan kebijakan keamanan jangka pendek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Perancis sudah merupakan langkah yang tepat dalam merespon kejadian luar biasa itu. Sekuritisasi yang dilakukan oleh Negara terhadap akses masuk ke dalam, merupakan tindakan cepat untuk mencegah kembali serangan terorisme dalam waktu dekat. Kerjasama selanjutnya yang dilakukan terhadap beberapa negara sekitar seperti Belgia untuk menangkap pelaku serangan, itu juga merupakan tindakan kebijakan keamanan nasional yang sangat strategis guna memutus rantai terorisme. Begitupun juga dengan beberapa kerjasama lain, hal ini merupakan langkah nyata yang diambil oleh Perancis dalam membuat kebijakan keamanan negaranya.

Bibliografi

- France. (2015). *Paris attacks president hollande act war islamic state group terrorismfrance*. Retrieved from www.France24.com.
- Habsy, Bakhrudin All. (2017). *Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur*. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90–100.
- Indrawan, Jerry. (2016). *Studi Strategis dan Keamanan*. Nadi Pustaka bekerja sama dengan Lingkar Studi Peradaban dan Perdamaian.
- Lindawaty, Debora Sanur. (2018). *Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia*. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 7(1). [10.22212/jp.v7i1.1116](https://doi.org/10.22212/jp.v7i1.1116)
- Muhaimin. (2015). *Perang Jadi Judul Media-media Prancis untuk Teror Paris*. Retrieved from Sindo News .
- Nainggolan, Poltak Partogi. (2016). *Ancaman ISIS/IS Di Indonesia (ISIS/IS Threats In Indonesia)*. *Kajian*, 21(3), 177–199. [10.22212/kajian.v21i3.950](https://doi.org/10.22212/kajian.v21i3.950)
- News, BBC. (2015a). *Belgia tingkatkan kewaspadaan ancaman teroris*.
- News, BBC. (2015b). *Pemerintah Inggris tingkatkan keamanan di dunia maya*.
- News, Internasional metro tv. (2015). *Pasca serangan di paris Prancis dan AS tingkatkan kerja sama militer*. Retrieved from metro tv news.
- Nizmi, Yusnarida Eka, & Milia, Jana. (2015). *Kebijakan Luarnegeri Amerika Serikat Terhadap Kelompok Terorisme Al-qaeda Pada Masa Pemerintahan Barack Obama*. Riau University.
- Putra, Guntur Yayus, & Priyanto, Spto. (2021). *Mengungkap Perekrutan Jaringan Kelompok Teror Muhajirin At-Tauhid (Mat) Di Media Sosial*. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(7), 2247–2262. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i7.2021.2247-2262>
- Reuters, AFP. (2015). *Kronologi awal teror di Paris*. Retrieved from Antaranews.
- Singh, Vikram J., Gude, Ken, Juul, Peter, Wechsler, William F., Lang, Hardin, & Katulis, B. (2015). *After the Paris attacks*. Washington: Center for American Progress.
- Sonjaya, A. E. P. Sopandi. (2017). *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Peledakan Bom Thamrin Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Triwahyuni, Dewi. (2013). *Perubahan Kebijakan Keamanan Amerika Serikat Pasca 11 September 2001 Untuk Kawasan Asia Tenggara*. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 1.
- Wajdi, Muh Barid Nizarudin. (2017). *Islam dan Radikalisme (Mengurai Makna Terorisme)*.
- Winarni, Luh Nila. (2016). *Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme*. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23), 56–63. <https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.894>